

Makalah Seminar

ETIKA POLITIK KATOLIK DALAM BINGKAI NKRI PAROKI KUMBA, 9 FEBRUARI 2019

Oleh: Dr. Marianus M. Tapung

Tak dapat dipungkiri, resonansi paternalisme politik mulai simultan bertumbuh di negara berkembang seperti Indonesia. Selama ini, terminologi 'paternalisme' mungkin hanya familiar dalam konteks diskursus sosial budaya, sejalan dengan pemaknaan yang negatif dan deviatifnya, ketika dipertentangkan dengan perspektif peradaban modern. Lantas, terminologi ini secara konseptual dan bahkan praksis, dipahami sebagai salah satu bentuk resistensi dari perjuangan kesetaraan, keadilan, partisipasi, kontestasi dan demokrasi. Para pejuang kesetaraan dan keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan menjadikan isu paternalisme ini sebagai komoditas untuk membangkitkan sejumlah emosi dan militansi perjuangannya. Dalam perkembangan peradaban politik di negara-negara berkembang, isu paternalisme ini juga menjadi semacam gandengan seksi demi menggairahkan semangat jiwa saat mengadvokasi kesetaraan dan keadilan berdemokrasi (Christopher, 2012). Bagi kaum idealis, unsur-unsur negatif dalam tubuh paternalisme dijadikan sebagai hal-hal potensial dalam rangka melawan dan melabrak konsep dan praksis politik paternalistik yang lagi akut belakangan ini.

Dalam pemikiran yang progresif-visioner, paternalisme politik telah diyakini sebagai bentuk negasi dan momok pada sebuah peradaban demokrasi berkeadilan. Keyakinan itu muncul ketika mendalami beberapa ciri khasnya, seperti: (1) Mengakarnya pola monolitik dan singularistik, yang berdampak pada *framing* pikiran dan sikap politik dari masyarakat. Pola monolitik dan singularistik ini merambah sampai pada hal yang paling mendasar dalam pilihan politik masyarakat. Masyarakat kerap dihadapkan hanya pada satu atau dua pilihan politik saja, sementara alternatif lain sangat tidak dimungkinkan. Turunannya, selain terjadi linearitas yang jenuh dan tidak terbukanya ruang dinamika dalam kontestasi, satu atau dua pilihan politik ini memberangus upaya tumbuh kembang kader-kader atau generasi-generasi baru sebagai pemimpin. (2) Dengan demikian, terkonstruksi skema berpikir kebanyakan masyarakat bahwa yang bisa terlibat dalam kontestasi politik hanyalah orang-orang yang lahir dari lembaga-lembaga politik, atau orang-orang punya akses dan diusung oleh partai politik. Dalam tataran kandidasi, persepsi politik seperti ini sangat wajar dan natural. Namun ketika berbicara pada level demokrasi berkeadilan, semua orang tentu memiliki akses dan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Tentu dengan catatan, terpenuhi syarat dasar (*baseline*) sebagai pemimpin seperti memiliki integritas, kompetensi, profesionalitas, kapasitas dan kapabilitas. (3) Ciri khas lain dari paternalisme politik adalah rendahnya partisipasi dan peran masyarakat untuk terlibat dalam proses regenerasi dan kandidasi pemimpin. Masyarakat sudah terpola dengan perilaku berpikir bahwa proses regenerasi dan kandidasi politik merupakan tugas dan tanggung jawab partai politik dan lembaga-lembaga terkait. Masyarakat merasa, baru akan terlibat waktu aktivitas pemilihan saja (*election event*). Padahal, dalam konteks demokrasi partisipatif dan berkeadaban, peran masyarakat sangat holistik dan imparial, di mana mereka seharusnya terlibat aktif dalam keseluruhan prosesi kandidasi, dari memunculkan calon pemimpin sampai pada saat memimpin. (4) Kentalnya paternalisme politik ini sudah pasti memberangus upaya kesukarelawan (*volutarisme*), yang sebenarnya menjadi semangat dari *platform* politik

modern. Paternalisme menjadi sangat alergi dengan volutarisme karena jiwa dan semangatnya begitu kontradiktoris. Paternalisme sangat menghendaki hirarkisme politik yang ajeg, mapan, tegak lurus, dan monologis; sementara valutarisme sangat terbuka pada dialog, mengedepankan dialektika, inklusivitas, konektivitas dan sinergisitas simpul-simpul kekuatan masyarakat. Bila paternalisme memunculkan pemimpin sebagai titisan yang 'sudah jadi' alias pakem, sementara valutarisme melahirkan pemimpin dalam konstruksi 'sedang menjadi', di mana ada proses pemunculan, pembentukan, pematangan dan kemudian penguatan. Dari sudut pandang voluntaristik, kepemimpinan bukan satu proses sekali jadi, tetapi berada dalam dinamika dan fluktuasi yang berkepanjangan dan alot. Selain itu, dalam kaca mata volutarisme, politik merupakan suatu aktivitas pembelajaran dalam merajut peradaban sejati, yang memungkinkan setiap masyarakat merasa memiliki kehidupan dan masa depannya.

Fenomena paternalisme politik dan karakteristiknya, secara simultan-faktual sudah menjalar sampai ke daerah. Konsep dan praksis paternalisme ini semacam menjadi bagian dari langgam politik daerah yang begitu kental. Ada beberapa variabel yang melanggengkan langgam paternalisme politik, seperti minimnya literasi, edukasi dan kesadaran politik pada tingkat akar rumput masyarakat, yang berdampak pada terkuaknya konvensionalisme, ortodoksionisme dan primordialisme pandangan politik. Beberapa daerah di Indonesia yang persis memiliki basis geo-kultural paternalistik, pandangan politik yang konvensional, primordial, dan ortodoks seperti ini justru semakin mendapat tempat. Misalnya, ada pandangan bahwa yang bisa jadi pemimpin daerah hanyalah kaum patriaki, kaum borjuis (bermodal), kaum darah biru (ningrat), kaum intelektual, dll. Rendahnya literasi, edukasi dan kesadaran politik ini berdampak pula pada pandangan yang parsial dan fragmentaris tentangnya. Politik dianggap sebagai kawasan asing nan kramat, yang hanya bisa dimasuki oleh para pihak yang berkepentingan; di sisi lain, masyarakat awam merasa rendah diri dan menganggap diri tidak bisa terlibat dalam konstelasi politik. Pada kasus paternalisme yang sengaja didesain, masyarakat bahkan sengaja tidak dilibatkan dan diberi akses dalam kancah pembangunan peradaban politik.

Paternalisme politik semakin menjadi akut dan mewabah, ketika oligarki mengambil alih dramaturgi politik di daerah. Peran dari para aktor sekaligus komprador politik dengan berbagai pertarungan kepentingan di dalamnya, turut mengafirmasi bahwa politik di daerah sangat paternalistik, berikht oligarkis. Peran komprador politik dengan manifestasi berbagai kepentingan, baik ideologis atau pragmatis, justru memperlebar disparitas peran politik. Masyarakat semakin merasa inferior, sementara para aktor ini semakin superior untuk menyutradarai permainan politik di daerah. Masyarakat menjadi komoditas wayang politik dan para komprador menjadi dalang yang mengatur arah pergerakan politik, sesuai dengan kepentingan dan pesanan. Dengan demikian, bagi segelintir kaum idealis yang memiliki ideologi politik yang progresif-visioner, akan tetap menjadi sekedar figuran dalam peta konstelasi perpolitikan di daerah. Berdasar kajian kualitatif ini, tentu pesimisme akan menghantui setiap kali ada upaya pergerakan politik yang inovatif dan kreatif, *out of the box* dan anti *mainstream* dari kaum idealis. Pada level yang menggurita, jika kaum idealis politik tidak mampu bertahan, sudah pasti akan termakan dan tenggelam oleh infiltrasi kepentingan pragmatis dari para komprador politik paternalistik.

Dengan demikian, paternalisme politik nasional tidak berdiri sendiri atau berkembang dalam jalurnya sendiri, tetapi merupakan akumulasi dan eskalasi dari fragmen-fragmen budaya paternalisme politik lokal. Bila fragmen-fragmen ini kuat dan

terus mengakar, sudah pasti akan membangun model pakem piramida paternalisme politik nasional. Selanjutnya, piramida paternalisme politik nasional ini menjadi bangunan yang menghalangi segala bentuk upaya inovasi dan kreasi politik di negara bangsa ini. Rupanya, selagi piramida paternalisme politik ini tegak berdiri, ruang bagi kaum idealis-visioner tidak akan mendapat tempat untuk berinovasi dan berkreasi.

Dramaturgi politik senantiasa membutuhkan rangkaian geliat yang ekspresif dan impresif. Dengan berbagai bentuk cara, para politisi atau pemimpin politik dari pusat sampai daerah, berusaha mengkarakterisasi bermacam pesan politiknya dalam kanal yang impresif ketika berinteraksi dengan masyarakat. Berjamak upaya demi merangkul kesan di ruang hati masyarakat merupakan bagian dari tujuan utama skema dramaturgis. Dalam perspektif pendidikan politik kritis, sebagai irisan dari pola dramaturgis, politik sebaiknya tidak hanya memainkan peran lama dan datar yang minim inovasi dan penuh dengan perspektif lawas, dengan pesan-pesan kadaluwarsa. Kalau tidak, hal tersebut tentu akan menimbulkan kejenuhan yang mendalam bagi masyarakat. Padahal kejenuhan tersebut bisa diminimalisasi ketika berbagai properti sumber daya yang sangat potensial di masyarakat, dieksplorasi dan dikembangkan secara kreatif dan inovatif dalam peran-peran politik nyata. Pemanfaatan yang baik dan cerdas terhadap properti sumber daya tersebut seyogyanya bisa menjembatani jurang antara ideologi politik dan faktualitas kemasyarakatan.

Karena adanya fakta kejenuhan dan minimnya eksplorasi mengenai faktualitas kemasyarakatan, akhirnya memunculkan gagasan imperatif mengenai pentingnya ikhtiar menyesuaikan dan menghubungkan antara apa yang terjadi di panggung depan politik dan panggung belakang kehidupan nyata masyarakat. Panggung depan (*front stage*) diwajibkan merepresentasi fakta dan kebutuhan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan bukanlah ajang hanya untuk mengakomodasi *platform* kepentingan politik kelompok. Panggung depan harus menjadi kanal simbolik untuk membahasakan secara lebih terstruktur, lugas dan sistematis tentang fakta dunia panggung belakang, yang kerap bersifat diferensiatif, polarisatif dan sulit diidentifikasi. Seturut fatwa etika politik, meskipun diferensiasi dan polarisasi senantiasa menjadi bagian dari fakta panggung belakang, *conditio sine qua non*, disuarakan di panggung depan oleh para pemimpin politik. Berbagai bentuk inisiasi, mediasi, kolaborasi, dialog, diskursus, kerjasama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak bisa menjadi panggung tengah (*middle stage*) untuk menghubungkan jarak antara panggung depan dan panggung belakang.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik Erving Goffman, kepiawaian memainkan peran yang berbeda antara panggung depan dan panggung belakang pada pemimpin politik disebut sebagai fenomena manipulasi diri. Dalam bukunya, *The Presentation of Self in Every Day Life* (1959), Goffman mengurai fenomena ini sebagai sintesis dari gaya (*manner*) dan penampilan (*appearance*) dari seorang pemeran. Gaya dan penampilan para pemimpin politik antara panggung depan dan panggung belakang merupakan bagian dari manipulasi diri. Gaya dan penampilannya dipoles dan dikemas sedemikian rupa untuk memperlancar penyampaian pesan-pesan politik. Sudah pasti pesan-pesan ini tidak terlepas dari titipan politik yang menyutradarainya. Manipulasi diri ini terungkap ke permukaan manakala permainan panggung depan sangat berbeda dengan situasi panggung belakang yang riil, orisinal, bermoral, manusiawi, apa adanya, terbuka, dan lugas. Menurut George Ritzer (2012), manipulasi diri di panggung depan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen kesan (*impression management*) ketika para pemimpin politik menggunakan taktik

tertentu untuk memelihara kesan 'seolah-olah' mereka bisa mengatasi berbagai masalah pada masyarakat.

Selanjutnya, dalam konsep dramaturgi, politik sebagai praksis maupun konsepsi, mesti dipahami secara dinamis. Pemahaman dinamis ini sudah pasti akan membuat politik memiliki daya tarik, daya saing, daya ungkit dan daya tahan bila bertarung pada level gagasan berikut praksisnya di masyarakat. Dramaturgi politik yang dinamis, fluktuatif dan bahkan gejolak membuat daya tarik tersendiri. Pada momen-momen tertentu, baik pada peristiwa politik tingkat dunia, nasional maupun lokal, politik menghipnotis atensi dari berbagai kalangan dan media. Karena seksinya ini, gunjang-ganjing politik bersaing begitu ketat bila disandingkan dengan diskursus mengenai ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, agama bahkan mengalahkan isu-isu besar terkait masalah paling krusial seperti pelanggaran HAM, penjualan manusia, krisis lingkungan, masalah derajat kesehatan, krisis moral dan identitas, kelaparan dan kehausan. dll. Politik juga berdaya ungkit yang besar dan menjadi ordinasi dari bidang-bidang lain. Dia menjadi semacam lokomotif untuk merangsang isu tentang bidang lain, sehingga membuncahlah berjenis konsepsi mengenai politik ekonomi, politik pendidikan, politik sosial-budaya, politik keamanan, politik agama, politik kesehatan, politik kemanusiaan, bahkan sampai pada ide tentang politik ideologi dan politik gagasan. Diskusi mengenai bidang-bidang kehidupan masyarakat, rasanya belum komplis bila tidak direlevansi dan dikorelasi dengan politik. Tentu, koefisien dari relevansi dan korelasinya sangat tergantung pada sejauh mana politik berdampak positif dan negatif terhadap bidang-bidang yang diungkitnya. Karena memiliki daya tarik yang seksi, didukung dengan daya ungkit yang besar serta daya saing yang kuat, maka politik pun sering bertahan menjadi *trending topic* pembicaraan masyarakat dan pemberitaan media cetak/daring.

Selain penuh dinamika dan warna-warni, dramaturgi politik juga kerap menampilkan sisi linear dan normatif. Sisi linear dan normatif ini justru bisa ditarikan dari adanya koefisien relevansi dan korelasi politik terhadap bidang-bidang yang terkait hajat hidup manusia di negara-negara digdaya maupun berkembang. Koefisiensi inilah yang kemudian bisa memunculkan asumsi tentang patron hirarki politik. Patron hirarki tampak pada garis lurus politik global dengan politik nasional, yang meski tidak kasat mata, tetapi mencuat melalui hubungan pengaruh dan sebab akibat. Misalnya, kebijakan politik negara-negara digdaya berpengaruh secara signifikan juga pada kebijakan politik dalam negeri dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Begitu juga yang terjadi dalam negeri. Platform politik nasional sangat memengaruhi politik di daerah. Perkembangan politik daerah berkelindan dengan konstelasi perpolitik nasional. Kebijakan dan kepentingan politik di daerah sebagian besar tidak bisa terlepas dari kebijakan dan kepentingan politik nasional. Jadi ada semacam garis hirarki patron politik yang tidak terhindarkan dari kancah politik dunia menuju politik nasional dan berikut politik daerah.

Di daerah, asumsi hirarki patron politik ini juga semakin tampak pada pola relasi kebijakan yang dibuat oleh pemimpin politiknya. Begitu kuatnya hirarki patron politik di daerah, sehingga sering kali para pemimpin politik tidak mampu keluar dari linearitas dan normativitas. Kondisi ini yang menyebabkan politik di daerah menjadi sangat stagnan dan *status quo*. Jika dipelihara, hirarki patron politik ini bisa mengembosi kreasi dan inovasi politik, dan membuatnya menjadi datar sekaligus hanya bagian pemanis bibir pada termin kampanye demi mengumpan elektoralitas. Hakul yakin, keadaan stagnasi dan *status quo* politik berdampak besar pada kebijakan roda pemerintahan (birokrasi) dan luaran lain seperti kebijakan strategis pembangunan. Pada titik kulminatif, keadaan ini membuat

masyarakat jengah sekaligus bosan yang luar biasa, sehingga berujung pada sikap fatalistik dan indiferen. Masyarakat menganggap politik hanyalah panggung manipulatif dari para pemerannya untuk menitipkan pesan kepentingan kelompok. Masyarakat menilai para pemimpin acapkali menampilkan peran-peran manipulatif yang berbeda jauh dengan realitas kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Nah, bila pemimpin politik tidak cerdas dan kritis dalam menyikapi dominasi dan determinasi hirarki patron politik ini, maka bisa terjebak pada peran panggung politik stagnan, bahkan sarat tipu daya.

Moralitas politik menghendaki adanya kecocokan dan kesesuaian antara apa yang terjadi di panggung depan dan panggung belakang. Dalam konteks politik kedaerahan, kecocokan dan kesesuaian ini sangat penting, karena masyarakat di daerah masih terbilang polos nan lugu dalam memahami politik. Sebagian besar dari mereka masih terkategori lurus dan jujur dalam memahami realitas, termasuk pentingnya politik bagi pengembangan kehidupannya. Karenanya, para pemimpin daerah sebaiknya menghargai kelurusan dan kejujuran masyarakat daerah ini, dan tidak menjadikannya sebagai peluang bereksplorasi pada permainan panggung depan politiknya. Karenanya, bermain peran yang realistis dan keluar dari jebakan hirarki patron politik akan membuat pemimpin politik menjadi lebih inspiratif dan kreatif. Peran-peran kepemimpinan politik akan menjadi lebih bermakna bila membahasakan secara lugas dan terus terang terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun hanya dalam bentuk simbol saat membawakan perannya, setiap pemimpin harus tetap komit dan konsisten dalam merepresentasikan realitas yang terjadi dalam tubuh masyarakat. Dengan demikian, tidak terjadi disparitas antara kejadian di panggung depan politik dan panggung belakang kehidupan riil masyarakat. Dan peran yang dimainkan tidak stagnan dan bebas dari manipulasi.

Dalam satu bab dari buku *Of Grammatology* (1976) Jacques Derrida menyatakan: *The end of the book is the beginning of writing*, yang secara lurus diterjemahkan: “Akhir dari (membaca) sebuah buku adalah awal dari (membuat) sebuah tulisan”. Derrida menjelaskan serangkaian makna bahwa seseorang dalam hidupnya tidak saja membahas tentang apa yang pernah dihasilkan, tetapi membeberkan juga kemungkinan untuk membuat sesuatu pada masa yang akan datang. Agar seseorang dapat menghasilkan sesuatu pada masa yang akan datang berdasarkan pada apa yang pernah ‘dibaca’ pada masa lalu, maka sangat dibutuhkan kreativitas. Dalam hal ini, kreativitas adalah bentuk keterbukaan untuk ‘membongkar’ yang sudah lama, dan kemudian menyusun dan membentuk kembali sesuatu yang baru berdasarkan pemaknaan yang baru pula. Pembentukan dan pemaknaan baru ini tidak menghilangkan ‘esensi’ dari yang lama, tetapi diperbaharui sesuai dengan tuntutan perubahan. Upaya kreatif untuk membentuk dan memaknai secara baru ini, diistilahkan Derrida sebagai proses dekonstruksi sosial.

Dekonstruksi sosial merupakan suatu kegiatan kreatif untuk membongkar klaim-klaim kemapanan yang sudah lama, tidak relevan dan kontekstual lagi, dan mencoba menatanya kembali pada posisi berbeda (transposisi), yang lebih positif dan konstruktif bagi kehidupan di dunia. Sudah pasti kegiatan kreatif untuk membongkar ini tidak menghilangkan sama sekali hakekat dari realitas yang ada. Hakekat dari realitas tetap dipertahankan, tetapi diberi makna baru sesuai tuntutan perubahan dan perkembangan. Dalam perspektif sosial politik, dekonstruksi sosial menjadi salah satu upaya alternatif dalam

membangun kehidupan yang lebih baik; yang ketika menggagas dan mengimplementasikannya, sangat membutuhkan kreativitas para pelakunya. Kreativitas dalam berpolitik merupakan bagian penting dari proses dekonstruksi karena berkaitan dengan upaya meruntuhkan tatanan lama yang telah merusak, dan kemudian menata tatanan kehidupan yang lebih baru dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari dekonstruksi yang kreatif, kegiatan politik menasar pada kesejahteraan dan keterarahan masyarakat pada prospek yang lebih bagus.

Ketika politik menjadi salah satu aktivitas potensial untuk bisa membangun masyarakat maka mereka yang terlibat dalam politik harus memiliki komitmen, totalitas dan opsi yang besar pada kepentingan masyarakat. Selain itu, mereka juga mesti kreatif dalam menangkap dan mengakomodasi harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat. Para pelaku politik dan institusi politik (partai) yang memiliki komitmen, totalitas, dan opsi ini yang besar pada kepentingan umum sudah pasti akan mendulang kepercayaan masyarakat. Karenanya, ekspektasi masyarakat pada para pelaku politik yang kreatif sangatlah besar. Harapan muncul selain karena adanya desakan akselerasi dan signifikansi pembangunan, juga karena masyarakat semakin menyadari bahwa perubahan yang begitu cepat, *sudden shift*, *unlinear* dan sporadik, hanya bisa diantisipasi melalui model pendekatan politik yang kreatif, dialektis, dan progresif. Konsekuensinya, untuk mendukung kreativitas, dialektika, dan progresivitas ini, para pelaku politik juga harus memiliki keutamaan-keutamaan penting seperti berperilaku fleksibel, dinamis, berwawasan luas, berani keluar dari zona nyaman, dan tidak takut mengambil resiko.

Selanjutnya, kreativitas, dialektika, dan progresivitas dapat dibentuk dan dikembangkan dengan tidak henti-hentinya membuka diri untuk melihat (*watching*) kondisi dan situasi faktual masyarakat; kemudian menganalisis (*analyzing*) dan menafsirkannya (*interpreting*); dan selanjutnya merenungkan (*reflecting*); serta yang terakhir adalah berpikir untuk melakukan sesuatu (*thinking for doing*) untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat. Terobosan-terobosan politik yang positif dan konstruktif akan membuka ruang dan peluang bagi pengembangan pemikiran dalam bidang politik yang dapat berdampak baik pada bidang-bidang kehidupan lain. Dengan munculnya berbagai inovasi, maka diharapkan dapat membongkar segala bentuk kebijakan-kebijakan yang membelenggu, yang selama ini mungkin tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Inovasi dan kreativitas dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan kritis, akan membuat demokrasi semakin berkualitas dan menjadi tumpuan harapan masyarakat.

Bila belajar dari negara yang berkembang dalam demokrasinya, politik masih menjadi aktivitas yang efektif dan 'berkekuatan' dalam membangun sebuah negara bangsa. Dalam hal ini, aktivitas politik yang dikembangkan senantiasa mengarah pada perubahan dan perkembangan masyarakat, dan sedapat mungkin menghindari konflik kepentingan, baik yang bersifat personal maupun institusional. Dan untuk negara-negara yang masih berusaha memantapkan politik demokrasi, perlu berada dalam proses belajar sehingga benar-benar memahami substansi berpolitik, berikut tujuan dan manfaatnya bagi kepentingan negara bangsa. Adapun munculnya berbagai konflik, friksi dan mungkin mengarah pada perpecahan, mesti dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dramaturgi politik demokrasi. Karenanya, para pelaku politik harus mampu mengelolanya secara kreatif dan inovatif, sehingga konflik dan friksi tersebut dapat diarahkan pada kematangan dan penguatan karakter berdemokrasi. Sehingga, sekalipun muncul berbagai

macam fluktuasi politik yang berat dan kasar, namun hal tersebut tidak sampai menyebabkan runtuhnya tonggak-tonggak demokrasi. Bahkan jika dilihat dari perspektif dialektika, keadaan tersebut akan semakin memantapkan dan memperkuat sendi-sendi bangunan demokrasi.

Politik sebagai salah satu aktivitas untuk mendekonstruksi kehidupan sosial sudah pasti berangkat dari pemahaman yang mendalam tentang keadaan dan situasi sosial masyarakat. Agar dekonstruksi berjalan dengan efektif dan berdaya guna, ada beberapa hal ini yang perlu diperhatikan: (1) Kreativitas untuk melihat kehidupan sosial berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang ada dalam masyarakat. Usaha melihat kebutuhan dari perspektif masyarakat akan sangat membantu membentuk kreativitas dalam berpolitik. Sebab kompleksitas kebutuhan masyarakat sudah pasti akan menuntut kreativitas dalam melakukan pendekatan pelayanan dan perumusan kebijakan-kebijakan yang strategis. (2) Segala bentuk pendekatan dan kebijakan politik mestinya selalu bertolak dari nilai-nilai yang sedang bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan dengan kreatif mengembangkan nilai-nilai tersebut untuk membantu menguatkan tonggak-tonggak kehidupan masyarakat. Dengan memberdayakan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut, aktivitas politik akan mendapatkan bobot yang lebih kuat dan berarti. Dengan berbasis pada nilai lokal, pendekatan dan kebijakan politik dapat lebih menghampiri kebutuhan masyarakat, dan menjadi harapan dalam memecahkan berbagai masalah yang menerpanya di kemudian hari. (3) Membuat wacana dan diskursus tentang prospek dan masa depan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat perlu dibawa dan digiring untuk keluar dari masalah yang melandanya dan mengarahkan mereka agar untuk berani menatap masa depannya. Aktivitas politik juga menjadi bagian dari upaya memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam memecahkan masalah-masalah keseharian hidupnya.

(4) Membuat jaringan kerjasama dengan pihak terkait dalam membahas berbagai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam kehidupan masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Selain untuk menghindari cara berpolitik yang *mainstream*, rutin, statis, dan linear, kerjasama juga perlu dibentuk untuk merekatkan hubungan relasional antara elemen-elemen masyarakat dalam memanfaatkan kekuatan/peluang dan menghindari/mencegah kelemahan/ancaman. Membangun persahabatan politik dengan pihak lain akan sangat membantu mendapatkan berbagai masukan yang lebih tepat dan akurat tentang situasi dan keadaan masyarakat. Studi relevansi, kontekstual dan korelasional tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat menjadikan aktivitas politik menjadi lebih responsif dan representatif. (5) Menambah bacaan/referensi ilmiah dan empirik akan sangat membantu mengembangkan wawasan untuk berpolitik secara kreatif. Karenanya, para pelaku politik perlu bergumul dengan berbagai bacaan/referensi agar semakin memiliki perspektif yang luas, baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran empirik. Bila memungkinkan, para pelaku bisa mengutarakan gagasan dan manifesto politiknya melalui tulisan yang dapat dipublikasi pada berbagai media sebagai bentuk kegiatan edukasi dan literasi terhadap masyarakat.